

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu aset utama bagi suatu negara untuk mempersiapkan generasi penerus bangsanya. Anak yang merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan baik, dalam tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa. Seorang anak juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlu mendapat perlindungan dan perhatian secara khusus, agar anak dapat bertumbuh kembang secara baik dan berkualitas sebagai generasi penerus bangsa.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>1</sup> “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”<sup>2</sup>

Dewasa ini, anak yang merupakan salah satu asset penting bagi suatu negara sering kali berhadapan dengan hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) yang dalam praktik hukum di negara Indonesia digunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum, adapun anak yang

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 1.

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 12.

berhadapan dengan hukum tersebut adalah mereka yang berhubungan dengan proses peradilan yang dibedakan menjadi tiga klasifikasi yaitu anak sebagai saksi, anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku.

“Perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri.”<sup>3</sup>

Dalam kaitannya dengan kapasitas anak sebagai pelaku tindak pidana pada umumnya mereka harus mendapatkan upaya perlindungan hukum dan juga upaya perlindungan hak asasi manusia agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak tersebut tidak terganggu dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal. Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai

---

<sup>3</sup>Absori, 2008. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.14.

perbuatan dan tingkah laku anak yang melakukan tindak pidana, perlu diingat bahwa anak juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan mendapat perhatian khusus karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.”<sup>4</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 “perlindungan khusus yang dapat diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dapat berupa perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasi, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, dan lain sebagainya.”<sup>5</sup>

Implementasi perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang baik sangat diperlukan untuk anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana karena berdasarkan prinsip proporsional harus mampu menciptakan nilai keadilan secara umum, yang mencakup nilai keadilan

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 Angka 1.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64.

bagi pihak korban, pihak pelaku, maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin dirumuskan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Surakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

- b. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Surakarta.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Surakarta.

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis dalam karya ilmiah dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah surakarta.
- b. Untuk memperluas dan mengembangkan daya penalaran dan daya fikir penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis, yakni bidang ilmu hukum.
- c. Untuk mampu mendorong dan mengembangkan cara berfikir yang kritis dan kreatif terhadap perkembangan penegakan hukum di Indonesia.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum

pidana, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

## E. Kerangka Pemikiran

Membicarakan hukum pidana berarti tidak dapat dilepaskan bukanlah mengenai perbuatan secara individual, melainkan dari permasalahan pokok dalam hukum pidana itu sendiri. “Hukum pidana apabila dipandang secara dalam, ada tiga permasalahan pokok yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (korporasi) yang melanggar larangan itu.”<sup>6</sup>

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan

---

<sup>6</sup>Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, hlm. 4.

nasional. Keberadaan anak dianggap sangat penting oleh karena itu setiap anak harus dilindungi hak-haknya.

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara pidana hak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Perlindungan anak merupakan salah satu cara untuk menjaga generasi penerus bangsa. “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>7</sup>

Mengenai perlindungan anak itu sendiri, apabila seorang anak melakukan kejahatan, maka sengketa anak tersebut tidak harus diselesaikan dengan pemidanaan saja, akan tetapi juga dengan menggunakan prinsip *restorative justice*. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “*Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative*”.

Berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 2.

bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang keadilan masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. “Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”<sup>8</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. “Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.”<sup>9</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan yakni penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta.

---

<sup>8</sup>Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 1.

<sup>9</sup> Khudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 1.



## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif. “Jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainnya.”<sup>10</sup> Adapun yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Surakarta.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

### a. Data Primer

“Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.”<sup>11</sup> Sumber data yang digunakan berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta, khususnya mengenai upaya perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

<sup>11</sup> Saifuddin Azwar, 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, hlm. 91.

## b. Data Sekunder

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu: norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya berupa bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka ditujukan terhadap literatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yang dikaji oleh penulis, mengenai upaya perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

b. Studi Lapangan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara:

1) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Penulis akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian mengenai upaya perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Kepada salah satu hakim yang pernah memutuskan kasus perkara tersebut atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta.

2) Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap hasil wawancara maupun dalam catatan mengenai upaya perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif, data yang diperoleh dari rekaman, wawancara, pengamatan, bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku dan sebagainya) dibuat dalam kata-kata atau kalimat dan dari data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir induktif yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **F. Sistematika Penelitian Hukum**

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dalam skripsi ini. Adapun bab-bab yang tersusun secara sistematis adalah sebagai berikut:

Bab pendahuluan di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian.

Tinjauan Pustaka berisi tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang hak asasi manusia, tinjauan umum tentang anak, dan tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Hasil penelitian dan pembahasan penulis akan menguraikan dan membahas yang di dalamnya menguraikan mengenai upaya pelaksanaan perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi

pelaku tindak pidana, serta kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Surakarta.

BAB penutup yang di dalamnya memuat simpulan penelitian dan saran.